

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Isu keamanan maritim muncul akibat banyaknya fenomena kejahatan di laut salah satunya pembajakan di perairan lepas Tanduk Afrika. Sebagai negara pelaut, Denmark ikut terlibat dalam melawan pembajakan melalui kebijakan keamanan maritimnya dikarenakan perairan disekitar Tanduk Afrika merupakan akses penting bagi perdagangan Denmark. Adapun strategi negara *Small but Smart* dimanfaatkan Denmark sebagai upaya dalam mengamankan perairan lepas Tanduk Afrika dengan cara mengedepankan kerjasama maritim dan memanfaatkan koordinasi melalui forum strategi kontra pembajakan. Upaya Denmark menggabungkan peran antara angkatan militer, pejabat negara dan industri pelayaran dengan tujuan melawan tindakan pembajakan.

Terdapat tiga level yang digunakan Denmark dalam mengorganisir keamanan maritim di perairan lepas Tanduk Afrika. Pertama berdasarkan epistemic level, Denmark memprioritaskan keamanan bagi kapal Denmark dengan cara mengelola pengetahuan maritim melalui aturan otoritas maritim Denmark. Pengelolaan keamanan maritim yang dimaksud berupa tindakan pencegahan pembajakan dan tindakan saat terjadinya pembajakan yang dapat dilakukan oleh kapal Denmark. Kedua berdasarkan level koordinasi, Denmark memainkan peran dalam memimpin isu peradilan melalui WG2 yang menghasilkan *Piracy Trial Transfer System*. Penciptaan alat hukum ini merupakan bentuk pengembangan dari Pasal 105 UNCLOS 1982. Ketiga berdasarkan level operasional, Denmark mengamankan aset militernya serta memimpin beberapa misi operasi NATO

dan AS. Tindakan ini memberikan manfaat bagi Denmark untuk terlibat aktif dalam strategi kontra pembajakan karena melawan pembajakan bukanlah hal yang dapat dilakukan sendiri oleh negara kecil. Sedangkan dalam membangun kapasitas dan memperbaharui sektor keamanan, Denmark melakukan pendekatan melalui pembangunan kapasitas maritim dan pembangunan kapasitas yurisdiksi. Pembangunan kapasitas maritim dilakukan Denmark melalui pelatihan militer, menjalankan program untuk menanggulangi pembajakan dan bantuan finansial untuk membantu kestabilan negara di Afrika Timur. Sedangkan melalui pembangunan kapasitas peradilan, Denmark memberikan bantuan dalam pengembangan penjara dan mengedepankan hak asasi terhadap tersangka bajak laut. Hal merupakan tindak lanjut dari *Piracy Trial Transfer System* yang dihasilkan oleh WG2.

Adapun upaya yang dilakukan Denmark juga menghasilkan beberapa pencapaian. Denmark dapat meningkatkan kepatuhan para pelaut melalui aturan otoritas maritim Denmark dan keberhasilan dalam intervensi militer bersama NATO dan AS. Kemudian kepemimpinan Denmark di dalam WG2 dipandang luas dalam menghasilkan struktur hukum untuk menindaklanjuti tersangka bajak laut agar dapat menjalani hukuman mereka.

5.2 Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal data yang didapatkan. Namun, melalui penelitian ini penulis mengharapkan bahwa strategi negara *Small but Smart* yang dilakukan oleh Denmark dapat memberikan gambaran bahwa negara kecil tidak menutup kemungkinan untuk memainkan peran dalam dunia internasional. Hal inilah yang mengantarkan

Denmark pada kebijakan keamanan maritimnya untuk melawan pembajakan di perairan lepas Tanduk Afrika. Adapun saran penulis untuk penelitian selanjutnya ialah mendalami wilayah operasi militer Denmark di perairan lepas Tanduk Afrika dan jalur laut yang digunakan dalam transaksi perdagangan. Penulis juga menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat mengetahui istilah-istilah umum angkatan laut yang sering digunakan dalam operasi militer.

